

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Nili Hayani

SMPN 31 Seluma Jalan Rawa Indah Kecamatan Iilir TaloKabupaten Seluma
e-mail: nilihayani2@gmail.com

Abstract: The aim of this study were: to describe the role of the school committee as a support, controller, giving consideration and a liaison between the school and the community in terms of education financing and describe the school committee policy in the face financing problems faced school. Research conducted qualitative descriptive approach. The subject of this study were principal, head committe and committe treasurer. The result of this study were: (1) School committee as a support support through funding, mind, and school infrastructure; (2) school committee as a controller of school building and financial; (3) School committee as giving consideration of infrastructure and school funds; (4) relationship with the community and parents can be established premises either.

Keywords: committee, utilization, education financing.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah: mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pendukung, pengontrol, pemberi pertimbangan dan penghubung antara sekolah dengan masyarakat ditinjau dari pembiayaan pendidikan; dan mendeskripsikan kebijakan komite sekolah dalam menghadapi masalah pembiayaan yang dihadapi sekolah. Pendekatan penelitian menggunakan studi deskriptif kualitatif. Setting penelitian di SMP Negeri 2 Seluma dengan subjek penelitian ketua komite, kepala sekolah dan bendahara komite sekolah. Hasil penelitian adalah: (1) peran komite sekolah sebagai pendukung melalui dana, pikiran, dan sarana prasarana sekolah; (2) peran komite sekolah sebagai pengontrol adalah pengawasan pembangunan gedung dan keuangan; (3) peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam pengadaan sarana, prasarana dan dana sekolah. (4) dengan adanya komite sekolah maka hubungan dengan masyarakat dan orang tua siswa dapat terjalin denga baik.

Kata kunci: komite sekolah, pemanfaatan, pembiayaan

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.

Hal yang perlu mendapat perhatian ialah pendanaan menyangkut keperluan sekolah, seperti biaya kegiatan kesiswaan, kegiatan kurikulum, tagihan listrik, ledeng, langganan koran, majalah dan internet, petugas sampah dan *cleaning service*. Tidak kalah adanya tuntutan menyangkut honor guru tidak tetap (honoror) dan instruktur ekstrakurikuler, insentif guru, pembelian peralatan kegiatan belajar, pemeliharaan gedung, dan penyelesaian sarana

dan prasarana sebagaimana diprogramkan dalam RAPBS.

Dalam penjelasan pasal 51 tersuratkan bahwa bentuk otonomi manajemen satuan pendidikan ialah melakukan pengelolaan kegiatan pendidikan oleh kepala sekolah dan guru serta dibantu komite sekolah. Pasal 56 ayat (1) dan (3) tersuratkan bahwa fungsinya melalui komite sekolah masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui komite sekolah, masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan berupa perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kedudukan komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan. Pada pasal 66 menyuratkan bahwa komite sekolah sebagai salah satu unsur yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan

Komitmen untuk menjadikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional memang sudah cukup jelas, sebagaimana digariskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 pasal 8 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Selanjutnya dalam pasal 9 disebutkan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 dalam Keputusan Mendiknas tersebut dinyatakan bahwa peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan: (1) *advisory agency* (pemberi pertimbangan), (2) *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan) dan (4) *mediator*, penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Biaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan. Bray (1996:18) mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber biaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan alokasi belanja untuk proses pengajaran, termasuk pengeluaran sekolah untuk gaji dan berbagai pelayanan di setiap jenis sekolah.

Dengan kata lain, pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber dan alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan. SMP Negeri 2 Seluma merupakan sekolah tertua di kabupaten Seluma, sejak mulai diresmikan pendiriannya sampai saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat baik dilihat dari bangunan fisiknya, pemenuhan sarana prasarana yang ada serta prestasi yang diperoleh. Perkembangan dan prestasi yang diraih ini ternyata tidak terlepas dari peranan komite sekolah. Komite sekolah SMP Negeri 2 Seluma telah berhasil memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan yang telah diraih oleh sekolah tersebut.

Salah satunya adalah peranannya dalam pembiayaan pendidikan. Kinerja yang baik dari

komite telah menghantarkannya menjadi sarana dan prasarana serta jelasnya penggunaan dana komite di sekolah tersebut. Peranan komite di sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pemanfaatan pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar, kegiatan sarana pembelajaran baik untuk pembelian kelengkapan pembelajaran, perbaikan dan pembayaran tunjangan guru dan honorer bagi guru non PNS. Selain itu, dana komite digunakan untuk kegiatan siswa. Seperti kegiatan pembelian alat-alat pendidikan seperti buku pelajaran, alat musik, dan penunjang perpustakaan. Oleh sebab itu, peran komite mengawakili wali keseluruhan siswa SMP Negeri 2 Seluma menjadi penting sebagai control sosial, pendukung ataupun sebagai pengukur terhadap pemanfaatan dana pendidikan di sekolah. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti: "Peran Komite Sekolah dalam Pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Seluma".

Rumusan masalah umum penelitian adalah: "Bagaimana peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Seluma?". Rumusan masalah khusus penelitian adalah: (1) bagaimana peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*) dalam pembiayaan pendidikan?; (2) bagaimana peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling*) dalam pembiayaan pendidikan?; (3) bagaimana peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan penggunaan pelaksanaan pembiayaan pendidikan?; (4) bagaimana peran komite sekolah sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat dari sisi pembiayaan pendidikan?; (5) bagaimana kebijakan komite sekolah dalam menghadapi masalah pembiayaan di sekolah?

Tujuan umum penelitian adalah mendeskripsikan peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Seluma?". Tujuan khusus penelitian adalah: (1) mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*) pelaksanaan program ditinjau dari pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Seluma; (2) mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling*) pelaksanaan program ditinjau dari pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Seluma; (3) mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan pelaksanaan ditinjau dari pembiayaan pendidikan program di SMP Negeri 2 Seluma; (4) mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai penghubung antara sekolah

ditinjau dari pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Seluma; (5) mendeskripsikan kebijakan komite sekolah dalam menghadapi masalah pembiayaan yang dihadapi sekolah.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan kajian penelitian yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui peran komite sekolah dalam mendukung pembiayaan pendidikan khususnya di SMP Negeri 2 Seluma. Dari kajian tersebut akan diketahui seberapa besar pengaruh adanya komite di sekolah ditinjau dari peran orang tua sebagai pembiayaan pendidikan di sekolah.

METODE

Pendekatan penelitian dilakukan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah ketua komite, kepala sekolah dan bendahara komite sekolah SMP Negeri 2 Seluma. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Proses analisis data ini peneliti lakukan secara terus-menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Di dalam melakukan analisa data peneliti mengacu tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2005:91) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan, atau biasa dikenal dengan model analisis interaktif. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap, maka peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan seterusnya sampai diperoleh data yang betul-betul mantap sehingga merupakan suatu siklus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Peran Komite Sekolah Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) Pelaksanaan Program Di SMP Negeri 2 Seluma

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, dapat dikemukakan bahwa bentuk dukungan dari masyarakat dan orang tua siswa selalu adanya partisipasi yang meliputi pemberian dana di SMP Negeri 2 Seluma dari orang tua siswa dalam pengembangan sekolah menuju pendidikan yang lebih maju dari sebelumnya.

Dukungan dalam bentuk dana tentunya sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat, orang tua, pengurus komite serta dari sekolah itu sendiri yang meliputi sumbangan dalam bentuk uang. Misalnya dalam bentuk

sumbangan uang berupa sumbangan awal masuk tahun ajaran baru serta iuran bagi siswa yang lama, hal ini dapat terlihat dari upaya komite sekolah dengan cara memberikan dorongan untuk mempertinggi komitmen orang tua untuk perkembangan sekolah, peningkatan mutu pendidikan dan menjalin kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat maupun orang tua siswa.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu guru lainnya menjelaskan: Bahwa bentuk partisipasi dari orang tua siswa maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah sangat tinggi, ini menandakan bahwa ada respon dari wali murid maupun masyarakat mengenai program yang dibuat oleh sekolah dengan komite sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketua komite sekolah bahwa dalam pengadaan komite sekolah ada juga kendala yang dihadapi sekolah yaitu berupa pengadaan komite sekolah yang tidak mencapai 100%, dikarenakan pendapatan orang tua yang berbeda-beda. Selanjutnya hasil wawancara dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Seluma menjelaskan: Kendala yang dihadapi dalam pengadaan komite sekolah dari orang tua siswa adalah keberadaan ekonomi dari masing-masing orang tua siswa. Pendapatan orang tua siswa di SMP Negeri 2 Seluma dapat dikatakan sangatlah berbeda, ada yang orang tuanya pegawai dan ada juga yang orang tuanya hanya Petani. Disinilah yang merupakan kendala dalam pengadaan komite sekolah.

Hal ini berarti bahwa tujuan dari pada komite sekolah yang dibebankan pada orang tua harus sesuai dengan kemampuan orang tua siswa maupun masyarakat sekitar yang bersangkutan, agar mereka bersungguh-sungguh ingin membantu dalam pengembangan sekolah tersebut.

Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga pengembangan, hal ini dapat didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemukahirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan pembelajaran.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah: dukungan dari komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah sangat besar. Dengan adanya dana yang disumbangkan dari orang tua siswa maka kebutuhan sarana dan

prasarana sekolah bisa terpenuhi walaupun belum sepenuhnya.

2. Peran Komite Sekolah Sebagai Pengontrol (*Controlling Agency*) Pelaksanaan Program Di SMP Negeri 2 Seluma

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kepala SMP Negeri 2 Seluma bahwa: Peran komite sekolah sebagai pengontrol bukan saja hanya untuk siswa melainkan pengawasan pada salah satu program yang dibuat sebelumnya. Dan pengawasan yang dilakukan disini bukan hanya dari pihak sekolah akan tetapi dari pihak komite sekolah juga melakukan pengontrolan ataupun pemantauan terhadap apa yang telah dikerjakan oleh sekolah.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama dengan ketua komite sekolah menjelaskan: Pengontrolan dalam komite sekolah dilakukan setiap 3-6 bulan ada evaluasi dalam kegiatan sekolah mengenai pendidikan dan juga mengenai pembangunan sekolah. Pengontrol disini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh sekolah maupun pengurus komite tentang pelaksanaan serta pengadaan dana, pembangunan untuk gedung sekolah dan setiap anggaran-anggaran yang direnggut sebelumnya komite memantau pelaksanaan program yang dibuat sejauh mana pencapaian dari pengadaan komite sekolah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua guru maupun staf yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Seluma bahwa: Pelaksanaan pengawasan untuk komite sekolah disini adalah melalui kunjungan untuk pelaksanaan program, rapat komite sekolah dengan sekolah, kemudian melihat bagaimanakah peran guru terhadap komite sekolah, serta melihat apakah pendidikan di sekolah itu berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan atau tidak. Kemudian pengawasan dapat dilihat dari proses kerja sama yang baik antara komite sekolah dengan masyarakat mengenai pelaksanaan program. Serta melihat kelancaran partisipasi dari orang tua tentang apa yang telah disepakati sebelumnya dan dengan adanya peran komite sekolah sebagai pengontrol ini bisa melihat sampai dimana hasil dari kerjasama antara sekolah dengan masyarakat untuk pengadaan komite sekolah.

Berdasarkan wawancara dari sekretaris komite SMP Negeri 2 Seluma menjelaskan bahwa: Pengontrolan dilakukan mulai dari pemasukan dana sampai pada keluaran dana berdasarkan program yang buat oleh sekolah guna kelancaran proses pendidikan yang ada di

SMP Negeri 2 Seluma. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah melakukan pengontrolan keberadaan dana komite sekolah agar orang tua dan masyarakat mengetahui kondisi dana ataupun keberadaan dana tersebut.

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama dengan wali murid SMP Negeri 2 Seluma bahwa: Pada dasarnya wali murid tidak secara langsung atau tidak setiap saat melakukan pengontrolan melainkan hanya sewaktu-waktu untuk mengkoordinir proses pendidikan dan pelaksanaan program dan pengontrolan terhadap keuangan orang tua siswa juga sering melaksanakan hal itu. Namun jika ada suatu permasalahan maka pihak masyarakat langsung melaksanakan musyawarah mengenai permasalahan yang ditemui dalam pengadaan komite sekolah. Kemudian pengontrolan dilihat dari segi keaktifan siswa. Jadi, jika kerjasama ini berjalan dengan baik tentunya anak-anak kita tidak merasa kurang dengan proses pelaksanaan pendidikan.

3. Peran Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*) Pelaksanaan Program Di SMP Negeri 2 Seluma

Komite sekolah dalam memberikan pertimbangan merupakan bentuk komite sekolah yang cenderung dilakukan oleh baik dari sekolah, pengurus komite, serta dari orang tua siswa dan masyarakat. Sebagai pemberi pertimbangan komite sekolah berperan dalam melaksanakan program seperti perencanaan sekolah yaitu memberikan pertimbangan dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, dan memberikan pertimbangan dalam pengadaan dana.

Selanjutnya wawancara dari Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 2 Seluma menjelaskan; Dalam pemberian pertimbangan dilihat dari segi dana, dari segi apa yang dibutuhkan oleh sekolah, partisipasi orang tua, dan masih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti pembangunan sekolah yang tidak sesuai dengan kondisi dana yang ada.

Dalam penyusunan program sekolah, pengurus komite maupun orang tua siswa diikut sertakan karena untuk penyusunan ini membutuhkan masukan serta rekomendasi dari masyarakat maupun komite sekolah. Dengan adanya pertimbangan maka dapat dirasakan bahwa ada topangan dari pihak komite dan juga masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama dengan semua staf guru di SMP Negeri 2 Seluma menjelaskan: pemberian pertimbangan dilakukan dengan cara membuat rapat dengan orang tua, rapat dengan Kepala Sekolah, rapat dengan guru, kemudian pihak sekolah mengundang pengurus komite sekolah untuk menyampaikan kebijakan sekolah. Serta cara melalui konsultasi dan musyawarah bersama dengan orang tua dalam pengadaan dana.

Pertimbangan yang diberikan sekolah terhadap komite sekolah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah pemberian masukan dalam pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan oleh sekolah dalam proses pembelajaran.

Hubungan dari sekolah dengan masyarakat serta komite sekolah dengan sekolah sangat dibutuhkan didalam menjalankan pengembangan sekolah semua itu akan tercermin dari uraian tugas komite sekolah. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam memberikan pertimbangan serta penentuan, pelaksanaan kebijakan pendidikan dan masyarakat sangat diharapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu komite sekolah dan masyarakat memiliki tanggungjawab terhadap kemajuan pendidikan diringkat satuan pendidikan sehingga menghasilkan keluaran yang mempunyai mutu atau kualitas yang baik.

4. Peran Komite Sekolah Sebagai Penghubung antara Sekolah dengan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program di SMP Negeri 2 Seluma

Penghubung antara sekolah dengan masyarakat salah satunya adalah berkomunikasi secara langsung agar terciptanya lingkungan sekolah yang efektif dan efisien. Melakukan hubungan dengan masyarakat baik itu dari berbagai perorangan, kelompok, dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan pembelajaran yang bermutu.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 2 Seluma menjelaskan bahwa: Peran komite disini yaitu menyampaikan segala program komite kepada masyarakat maupun orang tua siswa sekaligus mensosialisasikan agar masyarakat lebih memahami tentang peran komite dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dari pada anak-anak.

Selanjutnya hasil wawancara bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Seluma

menjelaskan: Dalam memediasi antara sekolah dengan masyarakat tentunya sekolah melaksanakan pertemuan ataupun rapat komite dengan orang tua siswa kemudian sekolah dengan pengurus komite menyampaikan program kepada orang tua dan masyarakat yang dibuat sebelumnya.

Kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan orang tua siswa sangat mempengaruhi proses pendidikan anak didik dan pengembangan sekolah. Di SMP Negeri 2 Seluma, peran komite sebagai penghubung merupakan salah satu bentuk kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan bentuk kerjasama antara kedua ini berjalan dengan aktif dan dengan adanya penghubung ini maka sekolah dengan masyarakat lebih akrab dalam bekerjasama untuk membangun sekolah tersebut dan ini ada timbal balik keduanya karena itu bisa dilihat dari segi lulusan dari SMP 2 Seluma yang sudah berhasil memenuhi standar lulusan.

Mediator/penghubung antara sekolah dengan masyarakat merupakan kesatuan untuk bekerja sama dalam meningkatkan jenjang pendidikan pada suatu sekolah yang ada. Hal ini diharapkan agar supaya sekolah dapat memiliki tujuan antara lain dapat memberikan informasi tentang tujuan program serta kebutuhan sekolah kepada masyarakat. Kemudian juga memberikan penerangan kepada sekolah tentang kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada sekolah. Pelaksanaan kegiatan komite sekolah di SMP Negeri 2 Seluma didukung oleh dokumentasi berupa melalui hubungan sekolah dengan masyarakat seperti rapat komite sekolah antara sekolah dengan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Seluma menjelaskan bahwa: Cara atau strategi dalam memediasi antara sekolah dengan masyarakat adalah meliputi yang pertama bahwa sekolah harus membicarakan dengan dewan guru mengenai program yang dibuat sebelumnya, konsultasi dengan pengurus komite sekolah, kemudian program yang dibuat harus dirinci terlebih dahulu dan selanjutnya akan disampaikan kepada masyarakat serta orang tua siswa pada pertemuan nanti.

Hasil wawancara bersama dengan Bendahara Komite Sekolah SMP Negeri 2 Seluma bahwa: Strategi yang digunakan dalam mediator yaitu mengunjungi masyarakat yang dikatakan mampu atau berhasil untuk memberikan motivasi pada sekolah dalam pengembangan sekolah se:

sekolah serta memberikan dorongan pada anak dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Seluma.

Setiap melakukan pembentukan komite pada sekolah tentunya terlebih dahulu menentukan strategi serta cara yang digunakan dalam membuat hubungan dan komunikasi yang baik antara sekolah dengan masyarakat atau dengan orang tua siswa. Komunikasi biasanya yang berisi hal-hal yang positif dalam suatu sekolah. Komunikasi yang baik adalah komunikasi terhadap seseorang yang dapat menumbuhkan kemauan dan semangat kerja yang baik disekolah seperti adanya bentuk kerjasama baik disekolah maupun di masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh gambaran yang jelas bahwa: Pelaksanaan rapat komite sekolah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Seluma secara bertahap. Serta selalu menjadi jembatan atau menjembatani antara sekolah dengan masyarakat dan begitu juga sebaliknya.

Melalui peran komite sekolah yang tinggi pelaksanaan suatu hubungan dapat mencapai maksud dan dapat dirasakan manfaatnya oleh pihak sekolah dengan masyarakat, dengan ketentuan bahwa pengurus komite sekolah dibentuk setelah program sekolah dibuat sebelumnya.

Pembahasan

1. Peran Komite Sekolah Sebagai Pendukung di SMP Negeri 2 Seluma

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dukungan dari masyarakat dan orang tua siswa selalu adanya partisipasi yang meliputi pemberian dana di SMP Negeri 2 Seluma dari orang tua siswa dalam pengembangan sekolah menuju pendidikan yang lebih maju dari sebelumnya. Pemungutan biaya dari orang tua siswa perbulan Rp.13.500,- sedangkan uang untuk non fisik adalah per enam bulan sebesar Rp.75.000,-. Selain itu pihak sekolah dan pengurus komite sekolah membuat program kemudian disampaikan kepada masyarakat dan seluruh orang tua siswa dan program tersebut diputuskan bersama dari pihak komite, sekolah, dan masyarakat serta orang tua siswa.

Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam hal ini sebagai pendukung dalam bentuk dana di SMP Negeri 2 Seluma saat ini masyarakat sangat berperan aktif, karena hal ini dapat dilihat dari segi pembangunan yang dananya berasal dari pemerintah dan orang tua siswa, ini memang sangat menunjang artinya dalam pelaksanaan setiap rapat atau setiap

pertemuan mereka juga ada antusias. Dari segi pendukung, memang komite sekolah sangat mendukung. Misalnya, dalam penyusunan program-program yang dibuat sekolah dan disahkan oleh pihak komite maka dari masyarakat sangat mendukung dengan apa yang dibuat oleh sekolah dengan komite sekolah.

Di SMP Negeri 2 Seluma untuk dukungan yang dimaksudkan disini adalah berupa bentuk dukungan partisipasi orang tua yaitu melalui dana dari orang tua, berdasarkan anggaran yang direncanakan oleh sekolah kemudian dimusyawarakkan kepada masyarakat dan orang tua siswa. Sesuai dengan program komite sekolah bahwa setiap tiga bulan dilakukan rapat secara formal dan rapat evaluasi tentang komite sekolah.

Sesuai dengan temuan di atas maka teori yang dapat mendukung temuan di atas dalam tataran pengelolaan Vincen (Eka, 2008) memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan, dan berapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya.

Muchdarsyah (Eka, 2008) menekankan pada penyusunan rencana didalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, *line of business*, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat.

Di SMP Negeri 2 Seluma selain dukungan dana, dukungan orang tua dalam bentuk pikiran dari masyarakat dan orang tua siswa memang ada, ini dapat dilihat dari masyarakat yang menyumbangkan satu ide atau pendapat dalam pengembangan dan peningkatan sekolah. Misalnya ide yang disumbangkan masyarakat dalam pembuatan Pos Keamanan Sekolah demi menunjangnya proses pendidikan peserta didik yang ada di SMP Negeri 2 Seluma.

Bentuk dukungan melalui pikiran disini adalah masyarakat dan wali murid memberikan partisipasi melalui pemberian pendapat yang dimukakan oleh masyarakat dan orang tua siswa terhadap program yang dibuat oleh sekolah.

Setiap pengembangan sekolah komite sekolah turut serta dalam memberikan dukungan dalam bentuk pikiran dan

meliputi bantuan ide/pendapat yang diberikan masyarakat kepada pihak sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Dari temuan diatas maka teori yang mendukung menurut Ihsan (2003:105) menyatakan peran serta masyarakat terhadap sekolah antara lain dalam bantuan-bantuan berupa pembiayaan sekolah dan bantuan berupa masukan dan pendapat dalam pengembangan sekolah (gedung, sarana, prasarana) lewat BP3 yang pada saat ini adalah komite sekolah atau secara langsung perorangan atau kelompok. Kemudian penyediaan tempat untuk mendirikan sekolah atau lapangan sekolah dan lain-lain untuk keperluan sekolah.

Dukungan dari komite sekolah dalam pengadaan saran dan prasarana sekolah sangat besar. Dengan adanya dana yang disumbangkan dari orang tua siswa maka kebutuhan sarana dan prasarana sekolah bisa terpenuhi walaupun belum sepenuhnya. Kemudian dengan adanya bantuan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah maka kami pihak komite turut memfasilitasi dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah.

Dari temuan di atas maka teori yang mendukung menurut Moenir (2011:67) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa Sarana dan Prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

2. Peran Komite Sekolah Sebagai Pengontrol di SMP Negeri 2 Seluma

Pelaksanaan pengawasan untuk komite sekolah disini adalah melalui kujungan untuk pelaksanaan program, rapat komite sekolah dengan sekolah, kemudian melihat bagaimana peran guru terhadap komite sekolah, serta melihat apakah pendidikan disekolah itu berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan atau tidak. Kemudian pengawasan dapat dilihat dari proses kerja sama yang baik antara komite sekolah dengan masyarakat mengenai pelaksanaan program. Serta melihat kelancaran partisipasi dari orang tua tentang apa yang telah disepakati sebelumnya dan dengan adanya peran komite

sekolah sebagai pengontrol ini bisa melihat sampai dimana hasil dari kerjasama antara sekolah dengan masyarakat untuk pengadaan komite sekolah.

Peran komite sekolah sebagai pengontrol siswa serta pada segi dari salah satu program yang dibuat sebelumnya. Pengawasan ini bukan hanya dari pihak sekolah akan tetapi dari pihak komite sekolah. Pengontrol disini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh sekolah maupun pengurus komite tentang pelaksanaan serta pengadaan dana, pembangunan untuk gedung sekolah dan setiap anggaran-anggaran yang direnggut sebelumnya komite memantau pelaksanaan program yang dibuat sejauh mana pencapaian dari pengadaan komite sekolah ini.

Dari temuan di atas maka teori yang mendukung (Ihsan, 2003:104) peranan masyarakat terhadap sekolah antara lain terutama dalam pengawasan, masyarakat terlibat juga dalam pengawasan terhadap sekolah (sosial control). Pengawasan ini terhadap gerak-gerik sekolah selaku lembaga pendidikan, pengawasan dapat secara langsung atau lewat komite sekolah atau lewat media massa. Dengan demikian pengawasan merupakan kontrol terhadap kerja organisasi, baik yang menyangkut tugas perorangan maupun tugas institusi.

Proses pengontrolan atau pengawasan berjalan dengan baik, bentuk dari pengawasan ini adalah berupa pengontrolan terhadap siswa maupun dari segi pembangunan siswa guna menunjangnya pembelajaran di sekolah.

Pengontrolan dilakukan mulai dari pemasukan dana sampai pada keluaran dana di SMP Negeri 2 Seluma. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah melakukan pengontrolan keberadaan dana komite sekolah agar orang tua dan masyarakat mengetahui kondisi dana ataupun keberadaan dana tersebut.

Pengawasan yang dilakukan sekolah dalam pengadaan komite sekolah merupakan bentuk kedua dari peran komite sekolah. Dengan adanya pengontrolan dari pihak sekolah baik itu dari segi penyelenggaraan pendidikan sampai pada saat keluaran pendidikan akan terdapat suatu hal yang bernilai positif dihadapan sekolah, pemerintah maupun masyarakat. Dalam melakukan pengontrolan tentunya ada evaluasi terhadap program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Misalnya, melaksanakan rapat dengan orang tua siswa dan menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah secara periode, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian

program sekolah serta menyampaikan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi maupun non materi. Masyarakat dan orang tua juga membutuhkan informasi tentang hasil belajar siswa persemester oleh karena itu diadakan rapat setiap enam bulan sekali dan pihak komite sekolah akan menyampaikan hasil tersebut kepada orang tua melalui rapat, karena komite sekolah sebagai jembatan antara pihak orang tua dan pihak sekolah.

Menurut (Sutedjo, 2009:12) bahwa sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu a) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; b) orang tua atau peserta didik; c) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Strategi yang dilakukan oleh komite sekolah terhadap pengelolaan keuangan tersebut adalah selalu mengadakan rapat terbuka bersama pihak sekolah, orang tua dan komite sekolah, misalnya dana sekecil apapun pengeluaran sekolah maka selalu ada bukti pembayaran yang ditanda tangani dan disetujui oleh pihak komite, kepala sekolah, bendahara dan penerima. Jadi punya tanggung jawab bersama dalam hal pengeluaran.

3. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan di SMP Negeri 2 Seluma

Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan memang sangat penting dalam pengadaan komite untuk memenuhi kebutuhan sekolah berupa alat dan bahan dalam sekolah. Dalam penyusunan program sekolah, pengurus komite maupun orang tua siswa diikuti sertakan karena untuk penyusunan ini membutuhkan masukan serta rekomendasi dari masyarakat maupun komite sekolah. Dengan adanya pertimbangan maka dapat dirasakan bahwa ada topangan dari pihak komite dan juga masyarakat.

Dalam pemberian pertimbangan dilihat dari segi dana, dari segi apa yang dibutuhkan oleh sekolah, partisipasi orang tua, dan masih

banyak lagi pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti pembangunan sekolah yang tidak sesuai dengan kondisi dana yang ada.

Dalam penyusunan program sekolah, pengurus komite maupun orang tua siswa diikuti sertakan karena untuk penyusunan ini membutuhkan masukan serta rekomendasi dari masyarakat maupun komite sekolah. Dengan adanya pertimbangan maka dapat dirasakan bahwa ada topangan dari pihak komite dan juga masyarakat.

Dari temuan di atas maka teori yang mendukung menurut Widodo, dkk (2008:207) bahwa pertimbangan mengenai sarana dan prasarana sekolah dalam pengembangan sekolah menjadi perhatian rutin bagi komite sekolah. Komite sekolah setelah mengadakan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dihubungkan dengan kondisi fisik, ditindak lanjuti dengan memberi pertimbangan kepada sekolah tentang sarana dan prasarana sekolah. Masukan dan pertimbangan mengenai prasarana dan sarana sekolah dibahas dalam rapat atau pertemuan sekolah. Sarana dan prasarana yang belum mendapatkan droping dari pemerintah menjadi sasaran utama dalam pembahasan antara Komite Sekolah dengan sekolah.

Pemberian pertimbangan komite sekolah dilakukan dengan cara membuat rapat dengan orang tua, rapat dengan Kepala Sekolah, rapat dengan guru, kemudian pihak sekolah mengundang pengurus komite sekolah untuk menyampaikan kebijakan sekolah. Serta cara melalui konsultasi dan musyawarah bersama dengan orang tua dalam pengadaan dana.

Pengadaan komite sekolah ada yang namanya untuk memberi pertimbangan, ini adalah bentuk ketiga dari peran komite sekolah. Tahap awal yang dilakukan dalam memberikan masukan, pertimbangan, serta rekomendasi kepada sekolah adalah mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat, menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi secara tertulis kepada sekolah, dan memberi pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Salah satu cara untuk pemberian pertimbangan untuk komite sekolah adalah dengan cara yang sederhana yaitu kesempatan yang diberikan pada masyarakat maupun orang tua siswa dalam pengadaan biaya. Menurut Widodo, dkk (2008:207) bahwa anggaran pemerintah yang dikucurkan untuk SMP sebenarnya tergolong ti

sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah-sekolah yang baik secara prestasi yang membawa konsekuensi dana yang cukup banyak. Kebutuhan anggaran untuk mencukupi kegiatan akademis dan non akademis serta fisik mendapat perhatian serius dari Komite Sekolah. Komite Sekolah dalam menjalankan perannya selalu memberi pertimbangan perihal anggaran. Pertimbangan disampaikan ke sekolah melalui mekanisme yang sudah menjadi kesepakatan yakni lewat RAPBS. Peran komite sebagai pertimbangan dapat ditingkatkan melalui sistem komunikasi yang lebih lancar. Hubungan timbal balik antara Komite Sekolah sebagai representasi pengguna pendidikan dan sekolah sebagai pengelola pendidikan harus terus menerus ditumbuh kembangkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.

4. Peran Komite Sekolah sebagai Mediator/ Penghubung di SMP Negeri 2 Seluma

Peran komite disini yaitu menyampaikan program komite sekaligus mensosialisasikan agar masyarakat maupun orang tua siswa lebih memahami tentang peran komite.

Dalam memediasi antara sekolah dengan masyarakat tentunya sekolah melaksanakan pertemuan ataupun rapat komite dengan orang tua siswa kemudian sekolah dengan pengurus komite menyampaikan program kepada orang tua dan masyarakat yang dibuat sebelumnya.

Menurut Ansar dan Masaong, (2007:165) didalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 54 dikemukakan: 1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; 2) masyarakat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Peran komite sebagai penghubung merupakan salah satu bentuk kerjasama antara sekolah dengan masyarakat serta dengan orang tua siswa, dan bentuk kerjasama antara kedua ini berjalan dengan aktif dan dengan adanya penghubung ini maka sekolah dengan masyarakat lebih akrab dalam berkerjasama untuk membangun sekolah tersebut.

Pengurus komite sekaligus wali murid memberikan pandangan kepada masyarakat berupa isu-isu tentang bagaimana agar masyarakat itu sendiri lebih memberikan dorongan kepada anak-anak didik mereka untuk bersama-

sama dengan pihak sekolah melaksanakan proses pendidikan yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Seluma.

Mediator antara sekolah dengan masyarakat adalah bentuk keempat dari peran komite sekolah. Untuk memediasi antara keduanya maka sekolah melakukan pertemuan/ rapat dalam menyampaikan tentang program yang dibuat sekolah. Penghubung dari sekolah dan masyarakat akan menimbulkan adanya hubungan yang aktif untuk pengembangan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Seluma.

Penghubung merupakan suatu proses munculnya keaktifan untuk bekerja sama antara sekolah dengan masyarakat. Temuan peneliti pada fokus ini adalah: a) sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat dan orang tua siswa dalam pengadaan dana guna meningkatkan pembangunan sekolah; b) sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat melalui orang tua siswa dalam pembangunan sekolah agar meningkatnya mutu pendidikan.

Peran komite sebagai penghubung merupakan salah satu bentuk kerjasama antara sekolah dengan masyarakat melalui orang tua siswa, dan bentuk kerjasama antara kedua ini berjalan dengan aktif dan dengan adanya penghubung ini maka sekolah dengan masyarakat lebih akrab dalam berkerjasama untuk membangun sekolah tersebut dan ini ada timbal balik antara keduanya karena itu bisa dilihat dan dapat dirasakan terutama dari segi lulusan dari SMP Negeri 2 Seluma yang sudah berhasil memenuhi standar lulusan.

Menurut Widodo, dkk (2008:210) pelaksanaan peran Komite Sekolah sebagai penghubung telah membuktikan adanya upaya mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat dan membuka akses hubungan masyarakat. Peran Komite Sekolah sebagai penghubung juga memiliki fungsi dalam mensosialisasikan program sekolah kepada masyarakat. Komite juga berperan memfasilitasi masukan dari masyarakat terhadap kebijakan program pengembangan sekolah. Sebagai penghubung dengan masyarakat, komite juga berperan dalam menampung pengaduan, keluhan dari masyarakat terhadap kinerja sekolah. Masukan yang berasal dari masyarakat kemudian dikomunikasikan kepada sekolah agar memperoleh perhatian yang pada gilirannya menjadi dasar perumusan program kebijakan.

5. Kebijakan Komite Sekolah dalam Menghadapi Masalah Pembiayaan Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 mengamanatkan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk siswa SMP Negeri 2 Seluma.

Arah kebijakan peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan dilaksanakan melalui antara lain penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan unit sekolah baru; penambahan ruang kelas dan penyediaan fasilitas pendukungnya; penyediaan berbagai pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus; serta penyediaan berbagai beasiswa dan bantuan dana operasional sekolah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Dalam menghadapi masalah yang dihadapi sekolah masalah pembiayaan pendidikan, komite SMP Negeri 2 Seluma mengambil kebijakan yang dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Oleh sebab itu, dari pengamatan peneliti dilapangan, bahwa komite SMP Negeri 2 Seluma melakukan kebijakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah pembiayaan pendidikan. Dalam menyelesaikan masalah pembiayaan pendidikan, komite SMP Negeri 2 Seluma mengambil kebijaksanaan:

1. Bagi siswa mampu diusulkan untuk memperoleh bantuan beasiswa miskin melalui BSM dan BOS;
2. Bagi ada siswa yang dua bersaudara maka pembiayaan komite hanya dikenakan satu orang siswa saja;
3. Bagi siswa yang menjadi juara umum dan mampu mengharumkan nama sekolah diberikan kebebasan biaya komite.

Pendidikan merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh setiap bangsa untuk mencapai kemajuan. Kualitas pendidikan masyarakat yang baik, tentunya akan memberikan efek positif bsgi kemajuan bangsa dan negaranya. Pendidikan memiliki banyak aspek yang harus dikelola secara baik dan benar.

Diantaranya seperti Konsep Dasar Administrasi, Manajemen Kesiswaan, Manajemen membiayaan, Sarana Prasarana, dan lain-lain. Oleh karena itu perlu adanya manajemen yang baik dalam dunia pendidikan.

Salah satu yang menjadi aspek utama dalam manajemen pendidikan ialah konsep dasar dalam mengelola pembiayaan pendidikan. Hal ini perlu mendapat kajian tersendiri mengingat hal tersebut merupakan komponen yang sangat penting dan paling menentukan keberhasilan setiap usaha pendidikan. Dana merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan.

Keuangan dan pembiayaan sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan yang memerlukan sejumlah investasi dari anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Investasi tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien serta diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuan. Hal ini merupakan kegiatan manajemen keuangan yang menunjang pelaksanaan program pengajaran. Beberapa kegiatan yang ada dalam pengelolaan biaya pendidikan mencakup tiga hal, yakni: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan biaya pendidikan.

Sekolah merupakan sistem yang terdiri atas serangkaian komponen yang saling terkait, dan membutuhkan masukan dari lingkungan untuk melakukan proses transformasi serta mengeluarkan hasil. Kebutuhan terhadap masukan dan pengeluaran sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan lagi. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketergantungan antara sekolah dengan masyarakat serta lingkungannya. Masukan terhadap sistem sekolah mencakup perangkat lunak, keras, dan manusia yang selaras dengan perkembangan lingkungan. Hal inilah yang akan memberikan konsekuensi dalam proses transformasi sistem sesuai dengan tuntutan lingkungan terhadap keluaran.

Perencanaan biaya pendidikan merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjalankan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost-effectiveness, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya dilakukan pers

menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukannya inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia.

Adapun pengklasifikasian dana pendidikan mencakup (1) Dana langsung dan tidak langsung, (2) Dana masyarakat dan dana pribadi. Dana langsung merupakan dana yang digunakan untuk operasional sekolah serta langsung dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar. Sedangkan dana tidak langsung adalah dana yang berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Dana tidak langsung adalah dana yang mencakup dana penunjang siswa untuk dapat hadir ke sekolah, diantaranya ialah biaya hidup, transportasi, serta catatan resmi. Berdasarkan pengelolaannya dana jenis ini tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam anggaran perencanaan sekolah. Dana tidak langsung seperti pajak dan retribusi dana pribadi ialah dana langsung yang dikeluarkan dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup setiap siswa.

Mengelola pelaksanaan anggaran ialah mempersiapkan pembukuan, melaksanakan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggung jawaban keuangan. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Maka setiap perolehan dana, maupun pengeluarnya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).

Dalam buku pedoman rencana, program dan penganggaran dikemukakan bahwa sumber dana pendidikan antara lain meliputi anggaran rutin (DIK), anggaran pembangunan (DIP), dan penunjang pendidikan (DPP), dana BP3, donatur, dan lainnya yang dianggap sah oleh semua pihak terkait. Di samping itu, sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun lembaga, baik di dalam maupun luar negeri yang sejalan dengan semangat globalisasi.

Dana yang berasal dari SPP dan DPP pada umumnya digunakan untuk proses belajar

mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar, penyelenggaraan ujian, pengiriman atau penulisan SKHU/Ijazah, perjalanan dinas supervisi, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, serta pendataan.

Evaluasi atau yang sering disebut *evaluation involves auditing*, merupakan pertanggungjawaban terhadap keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah yang berkaitan dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah setiap akhir tahun anggaran sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap dana yang dikeluarkan selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini dilakukan di dalam rapat Dewan Sekolah, yang diikuti komponen sekolah, komponen masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurut Cormark (1970) *auditing is verification. Auditing is determining that what is intended is what is being performed and, further that what is being performed is appropriate for the task.*

Auditing merupakan salah satu cara pembuktian dan penentuan apakah penganggaran dan pengelolaan yang dimaksud telah sesuai dengan pelaksanaan dan sesuai dengan tugas yang ditetapkan. Proses ini meliputi pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan biaya pendidikan haruslah melalui proses sebagai berikut, diantaranya perencanaan biaya pendidikan, pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan, dan evaluasi pengelolaan biaya pendidikan.

Untuk mencapai tujuan bersama, perlu diadakan kerjasama yang baik dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Dengan tetap memperhatikan keterkaitan antar pihak-pihak yang terkait dalam terbentuknya pendidikan, pemerintah, sekolah, guru, siswa, masyarakat, dan orang tua. Dengan adanya pengelolaan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran, maka hal tersebut akan menentukan tingkat kemajuan dan keberhasilan tujuan pendidikan. Kebijakan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Selama dilakukan dengan cara musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Misalnya mengata

siswa untuk menyelesaikan biaya pendidikan di sekolah, pemberian penghargaan bagi siswa yang mempunyai prestasi di sekolah dan luar sekolah serta mampu mengatasi kesulitan orang tua siswa melalui pengajuan program usulan dana BSM dan BOS.

Hasil penelitian menunjukkan selain dukungan dana yang diperoleh dari masyarakat dan orangtua siswa, pihak komite juga selalu berusaha untuk memperoleh bantuan dana dari pemerintah. Langkah yang telah ditempuh oleh pihak komite untuk memperoleh dana dari pemerintah dengan membuat sertifikat tanah.

Proses pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban biaya pendidikan di SMP Negeri 2 Seluma, secara administratif diarahkan kepada mekanisme pengelolaan dana secara terpadu. Keterpaduan tersebut terlihat dari keterkaitan unit-unit kerja sekolah didalam proses-proses administratif secara teratur dan dalam siklus tertentu dengan maksud memperjelas tentang siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, bagaimana dan untuk apa hal itu dilakukan.

Adapun instrumen pengawasannya terdiri atas pemeriksaan dan pelaporan. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan penggunaan biaya pendidikan. Kegiatan ini meliputi sub-sub pemeriksaan terhadap penganggaran, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penggunaan biaya. Adapun waktu pemeriksaan terdiri atas dua jenis, yaitu pemeriksaan secara insidental dan pemeriksaan berkala setiap triwulan. Ruang lingkup pemeriksaan dapat bersifat menyeluruh, dapat pula terfokus hanya kepada satu dua sektor pembiayaan yang dianggap sangat urgen bagi pelaksanaan layanan pengajaran. Pelaporan secara tertulis sebagai pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara periodik. Arus pelaporan dimulai dari pelaksana belanja dan pelaksana kegiatan kepada kepala sekolah.

Berdasarkan mekanisme penyusunan RAPBS di SMP Negeri 2 Seluma. Kepala sekolah bersama tim dan komite menyeleksi kegiatan apa saja yang harus dibiayai sesuai dengan kategori program pendidikan yang diselenggarakan atau ditingkatkan pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan seleksi dan identifikasi kebutuhan itu tim kemudian menyusun RAPBS Sumber dominan biaya pendidikan di SMP Negeri 2 Seluma berasal dari anggaran pemerintah. Sebagaimana sekolah-sekolah negeri pada umumnya, SMP Negeri 2 Seluma mulai melakukan upaya kreatif untuk

menggali dan menganeekaragamkan sumber perolehan dana pendidikannya. Hal yang selama ini ditempuh masih terbatas pada penghimpunan dana dari orang tua siswa melalui komite sekolah.

Prosedur dan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan mengacu pada ketentuan yang merupakan suatu syarat penting dalam pengendalian mutu keuangan. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik, penerimaan dan pengeluaran dan dapat menimbulkan kesalahan yang tidak segera diperbaiki. Keberhasilan lembaga dalam menyusun RAPBS tahun yang lalu maupun pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana akan diketahui melalui keserangkaian kegiatan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Mengenai evaluasi pendayagunaan biaya pendidikan di SMP Negeri 2 Seluma secara administratif diarahkan kepada mekanisme pengelolaan dana secara terpadu. Keterpaduan tersebut terlihat dari keterkaitan unit-unit kerja lembaga pendidikan di dalam proses-proses administratif secara teratur dan dalam siklus tertentu dengan maksud memperjelas tentang siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, bagaimana dan untuk apa hal itu dilakukan. Adapun kegiatan pokok evaluasi terdiri atas pemeriksaan dan pelaporan.

Tahap awal yang dilakukan komite sekolah dalam memberikan masukan, pertimbangan, serta rekomendasi kepada sekolah adalah mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat, menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi secara tertulis kepada sekolah, dan memberi pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Mediator antara sekolah dengan masyarakat dilakukan dengan pertemuan/rapat dalam menyampaikan tentang program yang dibuat sekolah. Penghubung dari sekolah dan masyarakat akan menimbulkan adanya hubungan yang aktif untuk pengembangan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan.

Peran komite sekolah sebagai pengontrol bukan saja hanya untuk siswa melainkan pengawasan pada segi dari salah satu program yang dibuat sebelumnya. Dan pengawasan yang dilakukan disini bukan hanya dari pihak sekolah akan tetapi dari pihak komite sekolah juga melakukan pengontrolan ataupun pemantauan terhadap apa yang telah dikerjakan oleh sekolah. Pengontrol disini merupak

dilakukan oleh sekolah maupun pengurus komite tentang pelaksanaan serta pengadaan dana, pembangunan untuk gedung sekolah dan setiap anggaran-anggaran yang direnggut sebelumnya komite memantau pelaksanaan program yang dibuat sejauh mana pencapaian dari pengadaan komite sekolah ini. Komite Sekolah dalam menjalankan perannya selalu memberi pertimbangan perihal anggaran. Pertimbangan disampaikan ke sekolah melalui mekanisme yang sudah menjadi kesepakatan yakni lewat RAPBS.

Optimalisasi peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan pada SMP perlu terus ditingkatkan melalui sistem komunikasi yang lebih lancar. Hubungan timbal balik antara Komite Sekolah sebagai representasi pengguna pendidikan dan sekolah sebagai pengelola pendidikan harus terus menerus ditumbuh kembangkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Peran Komite Sekolah sebagai penghubung juga memiliki fungsi dalam mensosialisasikan program sekolah, memfasilitasi masukan dari masyarakat, menampung pengaduan, keluhan masyarakat terhadap kinerja sekolah. Masukan yang berasal dari masyarakat kemudian dikomunikasikan kepada sekolah agar memperoleh perhatian yang pada gilirannya menjadi dasar perumusan program kebijakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa:
1. Komite SMP Negeri 2 Seluma telah menjalankan fungsinya sebagai badan pertimbangan yang tertuang dalam RAPBS, sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan lancar karena anggaran telah ditetapkan secara cermat. Komite sekolah selalu mengupayakan penyusunan RAPBS secara efektif dan efisien sehingga tidak terjadi pemborosan biaya pendidikan.
 2. Komite SMP Negeri 2 Seluma telah mampu menjadi *supporting agency* sekaligus mediator dalam hal penggalangan dana dan alokasi biaya pendidikan.
 3. Komite sekolah SMP Negeri 2 Seluma dalam hal pengawasan dan evaluasi biaya

pendidikan telah dapat menjalankan fungsi *controlling* dengan baik. Kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan komite dalam hal pengawasan dan evaluasi telah dapat memberikan informasi yang positif untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya.

4. Dengan adanya komite sekolah maka hubungan dengan masyarakat dan orang tua siswa dapat terjalin dengan baik. Hubungan ini berupa kerja sama dalam pengadaan dana dan dalam pengadaan pembangunan sekolah.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya komite sekolah mampu memberikan pertimbangan yang efektif masalah penggunaan dana BOS, BSM dan keuangan lainnya.
2. Kebijakan komite sekolah dalam menghadapi masalah pembiayaan di sekolah hendaknya mampu memberikan kebijakan yang positif demi pengelolaan dana komite sekolah yang efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman masalah keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, M.I. 1991. *Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan*. Mimbar Pendidikan, No. 1 Tahun X 1991:28-33. (12 Oktober 2014)
- Budimansyah, Dasim. 2007. *Tim Pengembangan Komite Sekolah*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen Depdiknas
- Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sadikin, Umar. 2011. *Panduan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Dewan Pendidikan Nasional
- Satori. 2001. *Wewenang Komite Sekolah*. Bandung: Rosda Karya.
- Sugiyono. 2005. *Metodologi penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia.